

## ABSTRACT

Siti Halimah Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Djuanda University, 2021. Implementation of the Integrated District Administration Service (PATEN) Policy at the Citeureup District Office, Bogor Regency. Supervisor I, R. Akhmad Munjin, Drs., M.Sc. Advisor II, Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.

After the issuance of the Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning Guidelines for District Integrated Administrative Services as a solution for administrative services, the authors are interested in researching with the title "Implementation of District Integrated Service Administration (Patent) Policies in Citeureup District, Bogor Regency, West Java Province." This study focuses on analyzing the Implementation of Non-Licensing Sub-district Integrated Service Administration (PATEN), the inhibiting factors in the implementation of PATEN, and knowing what efforts to improve the implementation of PATEN Citeureup District, Bogor Regency.

This thesis uses a quantitative research method with a descriptive approach and data collection techniques through interviews, documentation, questionnaires, and observation. The research sample used was all employees at the Citeureup District Office, Bogor Regency, which amounted to 78 people selected from a saturated sampling technique. It could also be called a *census*, a sampling technique using all population members as a sample. Data analysis used the Score Mean Weight formula. This study found that the employee respondents' assessment of the implementation of the PATEN policy showed an average value of 3.35 with a reasonably good interpretation category. From the research results, it is known that there are variable indicators, namely the dimensions of communication, the dimensions of resources, the dimensions of disposition, and the dimensions of the bureaucratic structure, as the basis of the research.

Based on the analysis results, some indicators must be improved from all dimensions, namely socialization to the community and related agencies, human resources (HR) in terms of quality and quantity, employee readiness, and distribution of authority that support the implementation PATEN. Thus Researchers must provide solutions related to problems in the field so that all groups can feel the PATEN policy as a form of development of sub-district level public services.

**Keywords:** *Analysis of Policy Implementation, PATEN, Citeureup District.*

## ABSTRAK

Siti Halimah Program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, 2021. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Pembimbing I, R. Akhmad Munjin, Drs., M.Si. Pembimbing II, Hj. Euis Salbiah, Dra., M.Si.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagai solusi pelayanan administrasi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor, Wilayah Provinsi Jawa Barat". Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) non perizinan, faktor penghambatan dalam penyelenggaraan PATEN, dan mengetahui upaya apa saja untuk meningkatkan implementasi PATEN di Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Penggunaan Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, penyebaran angket dan observasi. sampel penelitian yang digunakan adalah seluruh pegawai di Kantor Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor yaitu berjumlah 78 orang yang dipilih berdasarkan teknik sampling jenuh atau bisa juga disebut *sensus*, yaitu teknik penentuan sample menggunakan semua anggota populasi sebagai sample. Analisis data menggunakan rumus Score Mean Weight. Hasil penelitian ini menemukan data bahwa penilaian responden pegawai terhadap kebijakan implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan di tingkat kabupaten menunjukkan skor 3,35 dengan kategori cukup baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terdapat indikator variabel yakni dimensi komunikasi, dimensi sumber daya, dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi diperoleh kategori penilaian baik. Namun berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa responden dalam analisis implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Citeureup masih terdapat indikator yang harus ditingkatkan dari semua dimensi yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait, sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kesiapan pegawai dan pembagian kewenangan yang menunjang pelaksanaan PATEN, dengan demikian Peneliti harus memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di lapangan agar kebijakan PATEN dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan sebagai bentuk perkembangan pelayanan publik tingkat kecamatan.

**Kata kunci:** Analisis Implementasi Kebijakan, PATEN, Kecamatan Citeureup.